

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media :	Radar Sampit	Halaman :	04
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post	Tabengan		

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Laporan Keuangan Tetap Mendapat Sorotan

SAMPIT, PPOST

Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah tahun 2021 dibahas secara rinci oleh DPRD Kotawaringin Timur. Meski telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tapi pembahasan tersebut dinilai tetap penting.

"Tugas kami mengawasi pelaksanaan pembangunan dan keuangannya," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat gabungan legislatif dan eksekutif.

Dimana Rudianur bersama Wakil Ketua II DPRD Hairis Salamad memimpin pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Bupati Halikinnor dalam pidato pengantar menyampaikan, bahwa laporan keuangan Kotawaringin

Timur 2021 mendapat opini WTP dari BPK RI. Namun Rudianur menegaskan banyak hal yang disoroti terkait pertanggungjawaban keuangan tersebut.

"Meski secara administrasi dinyatakan telah sesuai aturan oleh BPK, namun ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian, seperti dalam hal belum maksimalnya peningkatan pendapatan, serapan anggaran, kegiatan yang ditunda hingga besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)," jelasnya.

Sorotan juga disampaikan Ketua Komisi III Mariani yang mempertanyakan besarnya SILPA. Hal itu perlu menjadi perhatian karena sangat disayangkan anggaran tidak terserap karena banyak program lain yang memerlukan dukungan anggaran.

"Kenapa realisasi tidak mencapai target? Seperti di Dispo-

ra perlu uang banyak tapi justru anggarannya tidak terserap maksimal. Hal seperti ini yang perlu kita evaluasi supaya tidak terjadi lagi," ujar Mariani. Sebelumnya Wakil Bupati Irawati dalam rapat paripurna menjelaskan bahwa besarnya SILPA karena kondisi yang membuat program tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana.

"Nilai SILPA itu sebagian besar adalah sisa kegiatan DAK fisik, DAK nonfisik, DBH dana reboisasi, saldo dana BLUD, dana BOS dan JKN," jelas Irawati.

Dia menambahkan, secara umum total realisasi pendapatan tahun lalu lebih besar dari realisasi penerimaan pada 2020. Ada kenaikan namun demikian ada pendapatan asli daerah berupa BPHTB yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggarannya. (ant/P6)